

Pers Tionghoa dan Dinamika Pergerakan Nasional di Indonesia, 1900 – 1942

Ahmad Kosasih

Ikhtisar: Bisa dikatakan bahwa pers membentuk sejarah dan sejarah juga membentuk pers itu sendiri. Pers berperan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang peristiwa di sebuah negara-bangsa. Ia sebagai alat komunikasi, penyampai ide, dan buah pikiran seseorang atau kelompok tertentu kepada orang atau kelompok lain. Pers, khususnya surat kabar, merupakan fenomena penting pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Pers pergerakan terdiri dari pers Belanda, pers Tionghoa, dan pers Bumiputera. Khusus tentang pers Tionghoa, secara umum dipandang mampu memberi inspirasi bagi perkembangan kesadaran berbangsa di kalangan warga keturunan Tionghoa di Hindia Belanda (Indonesia sekarang). Pers Tionghoa pun berpotensi membangkitkan kesadaran kolektif, yang menjurus kepada upaya membangkitkan kesadaran kaum Tionghoa tentang arti pentingnya “nasionalisme”. Karenanya melalui pers, keterlibatan etnis Tionghoa kedalam dinamika pergerakan nasional Indonesia secara sadar telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang terus bergerak dalam mencari dan menemukan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Kata kunci: Pers, surat kabar, etnik Tionghoa, nasionalisme Indonesia, dan sejarah pergerakan nasional.

Abstract: It can be said that press creates the history and, vice versa, history creates the press. Press has a role in delivering various informations about the events in a nation-state. It is as communication tool, the conveyor of one's or particular group's idea or thought to other. Press, especially newspaper, is an important phenomenon in the period of national movement in Indonesia. The press concerned with national movement in that era was that of Dutch, Chinese, and “Bumiputera” (Indonesian people). Specifically for Chinese press, it is generally assumed to be able to give inspiration for the development of national awareness among Chinese descendants in Dutch East Indies (Indonesia nowadays). The Chinese press is also potential in inspiring collective awareness that leads to the effort of generating Chinese people awareness about the importance meaning of “nationalism”. Therefore, by press, the involvement of Chinese ethnic in Indonesia national movement dynamic has consciously been a part of Indonesia society that continually moves in searching and finding its identity as Indonesia nation.

Key word: Press, newspaper, Chinese ethnic, Indonesia nationalism, and the history of national movement.

Pendahuluan

Pers mempunyai pengaruh besar dalam sejarah pergerakan nasional di Indonesia. Bisa dikatakan bahwa pers membentuk sejarah dan sekaligus

sejarah membentuk pers itu sendiri. Pers berperan dalam menyampaikan berbagai informasi tentang peristiwa yang terjadi di sebuah negara-bangsa. Ia sebagai alat komunikasi, penyampai

Ahmad Kosasih, M.Pd. adalah Dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas IPPS (Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial), Universitas Indraprasta PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), Jalan Nangka No.58C Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, Indonesia. Alamat e-mail: aseng.kosasih@gmail.com

ide, dan buah pikiran seseorang atau kelompok tertentu kepada orang atau kelompok lain, baik dalam jumlah yang terbatas maupun dalam jangkauan tidak terbatas.

Karenanya, pers di masa pergerakan nasional Indonesia tidak lepas dari kondisi sosial-politik yang menempatkan pers pada sub-sistem masyarakat kolonial, yang berfungsi memberikan penggambaran tentang realitas kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Pers di sini, dengan demikian, telah membuka pikiran rakyat dan sekaligus sebagai alat propaganda dalam arus pergerakan (Rahzen, 2007). Semuanya itu secara bersamaan mendukung gerakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pergerakan nasional (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980).

Sejarah persuratkabaran di Hindia Belanda (sekarang Indonesia), berdasarkan penerbitan dan kepemilikannya, dibagi menjadi: (1) surat kabar Hindia Belanda, yang umumnya berbahasa Belanda dan diterbitkan serta dikelola oleh orang-orang Belanda; (2) surat kabar Tionghoa yang berbahasa Cina-Mandarin atau Melayu-Tionghoa, yang dikelola orang-orang China, baik *peranakan* maupun *totok*; serta (3) surat kabar Bumiputra, termasuk surat kabar daerah, yang berbahasa Melayu, Arab, Daerah, dan belakangan berbahasa Indonesia (Soebagio, 1977; dan Taufik, 1977).

Mengenai Surat Kabar Tionghoa

Dengan mengikuti jejak orang-orang Indo-Eropa, komunitas Tionghoa juga menerbitkan beberapa surat kabar, yang diawali dengan diterbitkannya surat kabar *Li Po* di Sukabumi, Jawa Barat (Jusuf, 2000). Tak lama kemudian, sejumlah surat kabar lainnya seperti *Pewart Soerabaia* (Surabaya, 1902); *Warna Warta* (Semarang, 1902); *Chabar Perniagaan* (Jakarta, 1903); *Djawa Tengah* (Semarang, 1909); dan *Sin Po* (Jakarta,

1910) mulai bermunculan.

Dalam hal ini, komunitas Tionghoa di Hindia Belanda dianggap paling mampu dalam mengembangkan industri persuratkabaran. Ini dengan alasan bahwa kondisi keuangan mereka lebih baik ketimbang kondisi yang dihadapi orang-orang pribumi Indonesia. Bahkan, beberapa surat kabar terbitan orang China ini oplahnya melampaui oplah surat kabar Belanda. Patut dicatat bahwa dalam struktur masyarakat Hindia Belanda terdiri dari orang-orang Belanda, orang-orang Indo, China, dan Bumiputra (Suryadinata, 1986). Jadi, wajar jika surat kabar yang diterbitkan sesuai dengan pangsa pasar dari kelompok ini jauh lebih luas.

Dekade 1920-an, kalangan Tionghoa peranakan di Indonesia menerbitkan sejumlah surat kabar lagi, antara lain: *Bing Seng* (Jakarta, 1922); *Keng Po* (Jakarta, 1923); *Sin Jit Po* (Surabaya, 1924); *Soeara Poebliék* (Soerabaya, 1925); dan *Sin Bin* (Bandung, 1925). Pada dekade 1930-an, surat kabar Tionghoa makin bertambah banyak akibat pengaruh perang anti Jepang. Namun, surat kabar Tionghoa *peranakan* tidak semuanya anti-Jepang, seperti yang ditunjukkan oleh surat kabar *Mata Hari* di Semarang dan *Hong Po* di Jakarta (Suryadinata, 1986).

Berbeda dengan surat kabar Belanda, kelahiran surat kabar Tionghoa yang dimotori oleh orang-orang China itu pada awal penerbitannya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi (Budiharto, 2005). Secara sosial, sebagaimana diketahui, bahwa pemerintah Hindia Belanda mengatur masyarakatnya berdasarkan ras, keturunan, dan status hukum Belanda. Orang Eropa atau orang-orang yang dipersamakan status hukumnya dengan orang Eropa menduduki posisi sosial istimewa. Sedangkan ras Tionghoa (China) pada mulanya dipersamakan kedudukannya dengan orang Pribumi (Indonesia). Hak-hak dari tiap golongan tersebut dibedakan berdasarkan

ketetapan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda (Suryadinata, 1986).

Orang Tionghoa, dengan demikian, dianggap lebih rendah kedudukannya dari orang Eropa dan mendapat perlakuan yang tidak adil, sehingga menyinggung perasaan mereka. Kekecewaan orang Tionghoa itu diperkuat lagi oleh politik pendidikan kolonial Belanda yang tidak memberikan kesempatan bagi anak-anak Tionghoa untuk masuk sekolah Belanda. Hal ini mendorong golongan Tionghoa berupaya untuk mendirikan sekolah swasta untuk anak-anak mereka. Semangat ini terutama didorong oleh sebuah perkumpulan *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) di Batavia (sekarang Jakarta). Berdasarkan catatan, pendirian organisasi ini memang bertujuan untuk mengenalkan kembali adat-istiadat orang-orang Tionghoa sesuai dengan ajaran Khonghucu, serta memperluas pengenalan budaya, huruf, dan bahasa Tionghoa di kalangan anak-anak mereka (PPB, 1952; dan THHK, 1953).

Selain pengembangan dalam bidang pendidikan, orang-orang China di Hindia Belanda, sejak awal abad ke-20 banyak memberikan perhatian pada perkembangan percetakan surat kabar, termasuk upaya mereka dalam mengedepankan semangat jurnalistik di kalangan kaum terdidik China. Dari segi redaksional dan susunan staf perusahaan, surat kabar Tionghoa semula menggunakan tenaga dari orang-orang Indo-Eropa, seperti yang dilakukan surat kabar *Chabar Perniagaan* dan *Sin Po* pada awal terbitnya. Dalam perkembangannya, surat kabar Tionghoa *peranakan* itu tumbuh secara mandiri. Bahkan, ada yang memberikan kesempatan kepada orang-orang bumiputra (pribumi) sebagai jurnalis atau pengelola. Hal itu ditunjukkan oleh pengelola dari surat kabar *Keng Po*, *Siang Po*, *Sin Po*, *Pewartia Soerabaia*, *Mata Hari*, dan *Sin*

Jit Po (Soebagio, 1981).

Namun, jika dilihat dari dimensi politis yang dipantulkan oleh surat kabar Tionghoa, setidaknya bisa dibagi dalam tiga aliran, yakni: kelompok *Sin Po*, kelompok *Chung Hwa Hui*, dan kelompok *Indonesiers* atau orang Indonesia. Kelompok *Sin Po* menolak kewarganegaraan Belanda dan menghendaki tumbuhnya nasionalisme Tiongkok. Sementara kelompok *Chung Hwa Hui* cenderung pro-Belanda tapi masih ingin mempertahankan identitas etnis Chinanya. Sedang kelompok *Indonesiers* tetap ingin mempertahankan identitas etnik China, tapi secara politik ingin berasimilasi dengan masyarakat lokal dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia (Thiam Tjing, 2008).

Berangkat dari penggambaran di atas, fenomena tentang sejarah pers Tionghoa, dalam konteks dinamika pergerakan nasional di Indonesia, menimbulkan pertanyaan lebih jauh tentang kedekatan hubungan pers Tionghoa dalam memberikan sumbangan bagi perkembangan dan kebangkitan nasionalisme dan dinamika pergerakan yang dimotori oleh para jurnalis keturunan Tionghoa. Dalam tulisan ini, penulis bermaksud untuk mengungkap kejelasan peran pers Tionghoa itu sendiri di tengah arus pergerakan nasional di Indonesia.

Tinjauan Teoritis: Mengenai Fungsi dan Kedudukan Pers dalam Masyarakat

Menurut UU (Undang-Undang) Nomor 40 tahun 1999 mengenai "Ketentuan tentang Pers", terutama pada pasal 1 huruf a, disebutkan bahwa "pers" adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis sarana yang tersedia (Deppen RI, 2000 dan 2003).

Pers, dalam hal ini, mempunyai dua pengertian, yaitu: dalam arti luas dan dalam arti sempit. Jika yang pertama, dalam arti luas, pers dapat diartikan semua kegiatan yang mencakup keseluruhan media komunikasi massa, seperti: radio, TV, dan surat kabar yang berfungsi memancarkan dan menyebarkan informasi, berita, gagasan, dan pikiran, baik gagasan/pikiran seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak lain. Sedangkan yang terakhir, dalam arti sempit, pers lebih digolongkan kepada produk-produk penerbitan yang melalui proses percetakan seperti koran atau surat kabar, majalah, tabloid, dan sebagainya yang juga dikenal dengan media cetak.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengertian pers di atas pada kenyataannya berkembang sesuai dengan kemajuan dunia teknologi informasi. Pers dalam bentuk media *on-line*, misalnya, saat ini telah menjadi salah satu primadona penyebaran berita dan informasi yang dipandang lebih cepat. Lain halnya bila pengertian pers itu dihubungkan dengan konteks periode pergerakan nasional di Indonesia, maka pengertian pers dalam artian sempitlah yang lebih mencerminkan keberadaan teknologi informasi saat itu. Karenanya, pengertian pers pada masa pergerakan nasional di Indonesia lebih tertuju pada produk-produk media cetak, yaitu surat kabar dan majalah (Rahmadi, 1990:10).

Hal ini pula yang mendorong terbentuknya pola pandang peminat atau sejarawan Indonesia yang mengidentikan pengertian pers di masa pergerakan nasional dengan perkembangan surat kabar saat itu. Pada masa itu memang dikenal tiga bentuk pers, yaitu: (1) Pers Hindia Belanda yang dimulai tahun 1744 ketika Erdmans Jordan menerbitkan surat kabar *Bataviasche Nouvelles* pada

masa Gubernur Jenderal van Imhoff; (2) Pers Tionghoa yang diawali dengan terbitnya surat kabar *Pemberitaan Betawi* tahun 1844; dan (3) Pers Indonesia dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya yang dipelopori oleh Raden Mas Tirta Adhi Soerjo dengan menerbitkan surat kabar *Medan Prijaji* pada bulan Januari 1907 (Saputra, 1991; dan Purnama, 2007).

Lebih lanjut tentang arti dan peranan pers di masa pergerakan nasional Indonesia dapat dipahami lewat pengetahuan tentang kedudukan dan fungsi pers masa itu. Pers secara garis besar mempunyai dua kedudukan penting di masyarakat, yaitu: (1) ia merupakan media komunikasi yang tertua di dunia, yang telah membuat suatu terobosan revolusi komunikasi, antara lain mengubah pola komunikasi tradisional terutama oral atau lisan menjadi tertulis; (2) pers sebagai institusi sosial menjadi bagian integral dari sistem lembaga masyarakat.

Hal ini terlihat pada proses kelahiran pers, di mana pers lahir untuk memenuhi keperluan masyarakat akan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa besar dan kecil yang terjadi di masyarakat. Juga pers menampilkan diri sebagai lembaga masyarakat yang membawa pesan tertentu. Di sinilah orang melihat tentang kehadiran dan manfaat pers itu dari nilai pesan atau informasi yang diberikan, baik berupa berita dan ulasan maupun pandangan-pandangan (Rahmadi, 1990:12).

Pers tidak hanya membuat terobosan revolusi komunikasi, tetapi pers juga menciptakan suatu sistem komunikasi yang terbuka di mana informasi dapat diperoleh oleh golongan sosial manapun. Dengan adanya sirkulasi informasi yang terbuka, mau tak mau, mengurangi keketatan hierarki komunikasi menurut usia dan kedudukan serta posisi monopolistis golongan yang berstatus tinggi, yang bila dibandingkan dengan masyarakat

pribumi pada saat itu umumnya mereka berada pada posisi yang amat lemah, dibandingkan dengan masyarakat Timur Asing (Cina, Arab, dan India), apalagi dengan golongan masyarakat kulit putih. Di sinilah terlihat peran dan fungsi pers di dalam masyarakat, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat, aspirasi kelompok atau golongan, dan membantu meniadakan kondisi yang tidak adil (Soebagio, 1977; Surjomihardjo & Suryadinata, 1980; dan Luwarso, 2000).

Pada umumnya, orang melihat sistem pers dikaitkan dengan bentuk sistem sosial dan politik dari suatu masyarakat atau bangsa. Hubungan pers dengan masyarakat dan pemerintah merupakan hubungan dimana interaksi itu tidak bisa dihilangkan. Jadi, kehadiran pers tidak lepas dari pengaruh pemikiran atau filsafat yang mendasari sistem masyarakat dan pemerintahan. Dengan adanya pers, ia mendorong timbulnya suatu pemikiran yang lebih kritis dan menolak sikap skeptis terhadap banyak aspek dari kehidupan tradisional serta mendorong kebebasan berpikir dan berekspresi, sehingga menciptakan forum yang cukup luas dan bebas dalam mengajukan pendapat, pikiran, kritik sosial, dan lain sebagainya (Siebert *et al.*, 1986; dan Rahmadi, 1990).

Pers juga berpotensi membangkitkan kesadaran kolektif, antara lain mengenai kepentingan umum seperti keamanan dan kesejahteraan; dan yang penting, pers juga turut membangkitkan kesadaran kaum pribumi tentang arti pentingnya "nasionalisme". Karena pers menciptakan suatu sistem komunikasi yang terbuka, konsekuensinya pers turut membuka dan memperluas cakrawala dan pandangan masyarakat, khususnya para kaum terpelajar dan elite modern yang telah memahami arti penting sebuah media massa. Dari surat kabarlah orang dapat mengetahui kejadian dan perkembangan dunia, serta apa yang terjadi di panggung

dunia mulai dipentaskan di tanah air, dengan mengambil semangat serta inspirasi dari kejadian besar tersebut, seperti: kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 dan Revolusi Tiongkok pada tahun 1911 yang merupakan tonggak gerakan nasional bagi bangsa-bangsa di Asia.

Pers juga berfungsi sebagai alat untuk mengintegrasikan masyarakat yang terdiri dari bermacam suku, adat-istiadat, agama, serta kepercayaan. Pers pun menciptakan suatu sirkulasi komunikasi yang terbuka, dalam arti jalur komunikasi yang sebelumnya terbatas pada hubungan tatap muka. Dengan pers maka komunikasi mampu melampaui batas golongan sosial, sub-kultural, dan kedaerahan sehingga dapat mengatasi hubungan segmentasi.

Selain itu, pada umumnya pers di masa pergerakan nasional Indonesia sudah memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar seperti: *Pemberitaan Betawi*, *Sinar Djawa*, *Oetoesan Hindia*, dan sebagainya, yang meskipun daerah peredarannya memakai bahasa Melayu sebagai *lingua franca* tetapi hal ini sangatlah besar pengaruhnya bagi perkembangan kesadaran nasional dan sekaligus Indonesianisasi dalam kehidupan berbahasa dan berbangsa.

Pers bagi kaum pergerakan, khususnya tokoh-tokoh yang banyak menggunakan surat kabar sebagai alat untuk menyuarakan pengalaman, pengetahuan maupun gagasan adalah media yang efektif dalam membangun kesadaran baru. Surat kabar dijadikan alat perjuangan yang bersifat terbuka dalam memberi kebebasan kepada kaum pribumi atau kelompok masyarakat Hindia lain untuk mengakui keberadaannya. Oleh kaum pergerakan, pers diupayakan agar tetap terbit guna menjadi forum bagi pemimpin pergerakan, anggota, beserta organisasinya agar dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama menjadi besar dan dewasa dalam semangat perjuangan dan penderitaan yang sama

(Saputra, 1991:21).

Tesis bahwa bangunan kebangsaan kita didirikan oleh tradisi pers bisa dilihat dari fakta sejarah bahwa nyaris seluruh tokoh kunci pergerakan kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia adalah tokoh pers. Dan posisi mereka dalam struktur pers umumnya adalah Pemimpin Redaksi (*hoofdredakteur*), atau paling rendah adalah redaktur.

Haji Oemar Said Tjokroaminoto, yang kita kenal sebagai salah satu “guru pergerakan nasional”, misalnya, adalah Pemimpin Redaksi surat kabar *Oetoesan Hindia* dan *Sinar Djawa*. Tokoh “tiga serangkai”, yakni Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, adalah yang menukangi surat kabar *De Express*. Semaoen, di usianya yang masih 18 tahun, sudah memimpin surat kabar *Sinar Djawa* yang kemudian berubah menjadi *Sinar Hindia*. Maridjan Kartosoewirjo menjadi reporter dan redaktur iklan di surat kabar *Fadjar Asia*. Sebelum berkonsentrasi mengurus dasar pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah Pemimpin Redaksi surat kabar *Persatoean Hindia* dan bahu-membahu bersuara dalam majalah *Pemimpin*.

Adapun Soekarno menjadi Pemimpin Redaksi surat kabar *Persatoean Indonesia* dan *Fikiran Ra'jat*. Setelah pulang dari Belanda dan menjadi pemimpin redaksi majalah *Indonesia Merdeka* dalam organisasi PI (Perhimpunan Indonesia), Mohamad Hatta dan dibantu oleh Sutan Sjahrir menakhodai surat kabar *Daulat Ra'jat*. Bahkan Amir Sjarifuddin dari Partindo (Partai Indonesia) menjadi Pemimpin Redaksi majalah *Banteng*, serta masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya (Soebagio, 1977).

Yang paling menarik dari peranan pers dalam pergerakan nasional di Indonesia adalah bahwa ianya merupakan media tempat menyalurkan aspirasi dan tujuan politik dari organisasi serta cita-cita dari tokoh-

tokoh pergerakan pada masa tersebut. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pers dijadikan salah satu alat propaganda bagi kaum pergerakan, sehingga tak dapat disangkal lagi di dalam perkembangan sejarah pers banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran dan faham-faham baru yang menjadi wacana bagi kaum pergerakan. Bahkan hampir setiap partai atau organisasi politik mempunyai surat kabar sendiri, seperti: Sarekat Islam mempunyai surat kabar *Oetoesan Hindia*; organisasi *Indische Partij* mempunyai surat kabar *Tjahaja Timoer* dan *Kaoem Moeda*; Perhimpunan Indonesia mempunyai majalah *Indonesia Merdeka*, dan sebagainya.

Berdasarkan laporan seorang penasehat pemerintah kolonial Belanda untuk urusan Boemi Poetra, dari 107 surat kabar dan majalah yang terbit sekitar tahun 1920-an, berbagai corak surat kabar dapat digolongkan menjadi: nasionalis, liberal, radikal, dan komunis di satu sisi; kemudian ada juga yang bercorak netral dalam politik dan hirau dengan urusan perdagangan di sisi lain (Surjomihardjo & Suryadinata, 1980). Demikianlah bahwa peranan pers dalam zaman pergerakan nasional di Indonesia dapat ditelusuri berdasarkan aspek kedudukan dan fungsi pers itu sendiri di masyarakat selama periode perjuangan pergerakan nasional.

Mengenai Pergerakan Nasional dan Etnis Tionghoa di Indonesia

Nasionalisme adalah faham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka (*ENI*, 1990:31-33). Memang, terdapat banyak pengertian mengenai “nasionalisme”, sebagaimana dinyatakan oleh Anthony D. Smith (2003:6-10). Bahkan Lottroph Stoddard mengatakan bahwa nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa atau adanya rasa kebersamaan golongan sebagai

bangsa (dalam Nodia, 1998). Hans Kohn (1976:11) juga menyebutkan bahwa nasionalisme sebagai suatu paham dimana kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara. Kemudian, Soekarno – dalam bahasa yang sederhana – menyatakan bahwa nasionalisme sebagai kecintaan terhadap tanah air dan bangsa.

Dengan demikian, melalui beberapa pemahaman tersebut maka nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah, serta kesamaan dalam cita-cita dan tujuan yang ditunjukkan dengan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok bangsa itu (Nodia, 1998).

Nasionalisme adalah salah satu dari kekuatan yang menentukan dalam sejarah modern, terutama bagi bangsa-bangsa yang mengalami penjajahan. Nasionalisme, selain dijadikan sebagai alat pengikat dalam rangka persatuan, juga seringkali dimaknai oleh bangsa yang dijajah untuk melawan penjajah, atau paling tidak nasionalisme dijadikan sebagai simbol perjuangan dalam menghadapi dominasi bangsa penjajah (Smith, 2003:143-145). Sebenarnya, ide nasionalisme sendiri berasal dari Eropa Barat pada abad ke-18 dan selama abad ke-19 tersebar ke seluruh Eropa dan sebagian wilayah Asia. Pada abad ke-20, nasionalisme dibumikan di masing-masing wilayah sehingga melahirkan nasionalisme di Eropa dan Asia dalam berbagai bentuk.

Nasionalisme difahami bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, nasionalisme mempunyai aspek politik; dan di sisi lain, nasionalisme itu juga bisa bersifat etnis dan mungkin juga agama. Dalam kenyataannya, nasionalisme mengandung aspek politik dan aspek etnis (Kohn, 1976:15). Ide kebangsaan adalah ide politik dan tidak ada nasionalisme tanpa unsur politik, meskipun substansinya sama dengan

etnis (Kahin, 1995). Begitu juga halnya dengan agama. Agama bisa dijadikan sebagai alat perekat yang menyatukan berbagai komunitas. Kedua bentuk nasionalisme – antara politik dan agama ini – seringkali berbenturan, karena keduanya mengklaim sebagai penjamin keteraturan dalam masyarakat. Kondisi ini juga pernah terjadi dalam sejarah pergerakan kebangsaan di Indonesia (Daeng Materu, 1985).

Penduduk Hindia Belanda (Indonesia sekarang) terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, agama, dan ras. Itulah yang menandakan adanya heterogenitas di Indonesia. Di antara suku bangsa yang ada di Indonesia, salah satunya adalah etnis Tionghoa. Masyarakat Tionghoa sudah ada sejak lama, tidak diketahui dengan pasti kedatangan mereka pertama kali. Indikasi kedatangan orang-orang Tionghoa ke Nusantara tentunya berkaitan dengan pertumbuhan jalur perdagangan melalui laut antara Tiongkok dengan India dan Persia.

Di dalam konteks ini, Asia Tenggara – termasuk Indonesia – memainkan peran yang sangat penting karena letaknya yang sangat strategis dan menjadi titik pertemuan perdagangan internasional, sehingga wilayah Nusantara menjadi tempat persinggahan bagi pedagang-pedagang asing, termasuk pedagang Tionghoa. Bahkan banyak diantaranya yang kemudian tinggal menetap dan menikah dengan wanita setempat, yang akhirnya pembauran dan asimilasi tak dapat dihindari lagi.

Sumber-sumber dari abad ke-14 dan 15 menyebutkan bahwa ditemukan bukti sejarah yang menyatakan adanya perkampungan orang-orang Tionghoa Islam di muara sungai Brantas Kiri (kali Porong) yang beraktivitas sebagai pedagang hasil bumi. Ini berarti bahwa jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, orang-orang Tionghoa telah singgah dan menetap di Nusantara. Kota-kota pantai menjadi pilihan mereka untuk melakukan aktivitas

berdagang, baik dengan masyarakat setempat maupun dengan suku-suku bangsa yang lain. Banyak diantara mereka yang kemudian menetap dan menikah dengan wanita setempat, bahkan tidak pernah kembali ke Tiongkok (KJTb, 2006b).

Asal-usul istilah “Tionghoa” baru populer pada akhir abad ke-19. Istilah ini mengacu pada istilah yang digunakan oleh dunia Malayu untuk merujuk pada Tiongkok dan orang-orang Tionghoa di Malaya dan Hindia Belanda (Su Kim, 2008:161-170). Sebelumnya, istilah baku yang digunakan adalah “China” atau “Tjina dan China” menurut ejaan Indonesia dan Malayu lama. Dalam barang-barang cetakan, istilah “China” sudah digunakan sejak abad ke-17. Pada waktu itu, kata “China” tidak dianggap sebagai istilah yang menghina dan tidak seorang pun yang mengusulkan agar istilah itu diganti dengan “Tionghoa” (Jusuf, 2000).

Di Tiongkok sendiri, popularitas istilah “Tionghoa” (lafal Hokkian, *Zhonghua* dalam bahasa Mandarin) berhubungan dengan bangkitnya nasionalisme pada akhir abad ke-19. *Zhonghua* digunakan beberapa abad sebelumnya sebagai sinonim *Zhongguo* (Tiongkok dalam lafal Hokkian) untuk menyebut darat pusat Tiongkok. Istilah *Zhongguo* bermakna Negeri Tengah atau *the Middle Kingdom*. Nasionalis Tionghoa pada zaman modern mengambil istilah ini untuk menyebut negara-kebangsaan dan bangsa yang baru (Suryadinata, 2002:100-102).

Memasuki abad ke-20, jumlah imigran Tionghoa menjadi semakin beragam. Mereka tidak lagi didominasi oleh pedagang kelas menengah atau saudagar kaya, namun dari berbagai lapisan sosial seperti tukang-tukang, pedagang kecil, buruh, dan kuli pasar. Perubahan ini tentu saja berpengaruh terhadap proses penyesuaian mereka dalam membentuk sistem dan struktur sosial komunitas Tionghoa di tempat

yang baru.

Dari tahun ke tahun, jumlah orang Tionghoa di Nusantara terus bertambah. Tujuan pertama kedatangan mereka adalah pusat-pusat yang menawarkan berbagai kesempatan pekerjaan. Karena itu, hidup secara berkelompok tidak dapat mereka hindarkan. Hal ini memberi kesan bahwa jumlah mereka jauh lebih besar dari keadaan yang sebenarnya. Secara kuantitas, mereka sesungguhnya adalah minoritas; namun dalam rantai ekonomi, mereka berhasil menduduki posisi dominan pada sektor perdagangan dan industri di Hindia Belanda. Dalam waktu beberapa generasi, mereka berhasil mengubah nasib dan menaikkan tingkat kehidupan sosial mereka (Suryadinata, 1978).

Berdasarkan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa atau China terbagi ke dalam 2 golongan, yaitu golongan Tionghoa *totok* atau *singkeh* dan *peranakan* (Joe Lan, 1961:7; dan Suryadinata, 1978:90). Jumlah golongan *peranakan* lebih banyak jika dibandingkan dengan golongan *totok*. Hal itu disebabkan karena mereka sudah empat bahkan tujuh generasi menetap di Nusantara. Akibatnya, golongan *peranakan* banyak yang tidak mengenal budaya Tionghoa dan menimbulkan jurang pemisah antara golongan *totok* dengan golongan *peranakan*.

Hingga pertengahan abad ke-20, etnis Tionghoa – baik *peranakan* maupun *totok* – tidak peduli dengan masalah politik dan identitas ke-Tionghoa-an mereka. Kesibukan mereka, baik di sektor ekonomi maupun status mereka sebagai warga asing, menyebabkan mereka enggan untuk ikut campur dalam bidang politik. Menjelang akhir abad ke-20, baru muncul kesadaran untuk meninjau kembali identitas mereka sebagai bangsa Tionghoa. Kesadaran ini mendorong munculnya perkumpulan-perkumpulan Tionghoa, baik perkumpulan marga dan suku

maupun perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh etnis Tionghoa. Sedangkan perkumpulan yang bersifat politik dan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut posisi masyarakat Tionghoa muncul pada awal abad ke-20 (Suryadinata, 2002).

Perkumpulan-perkumpulan Tionghoa dapat dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: (1) perkumpulan yang murni bersifat sosial dan tidak turut campur dalam bidang politik; serta (2) perkumpulan yang bersifat sosial dan bertujuan untuk memperjuangkan posisi etnis Tionghoa di Hindia Belanda. Perkumpulan yang dikategorikan golongan kedua tersebut turut campur dalam bidang politik dan selalu mendapat pengawasan, baik gerakan-gerakan perkumpulan Tionghoa yang mengarah pada nasionisme di Tiongkok maupun yang mendukung perjuangan Bumi Putera di Indonesia (Suryadinata, 2002).

Untuk menyebut organisasi atau perkumpulan orang-orang Tionghoa yang memelopori kesatuan etnis Tionghoa di Surabaya menjelang akhir abad ke-19, misalnya, sebuah perkumpulan Tionghoa *peranakan* dari suku Hok Kian yang diberi nama perkumpulan *Hok Kian Kong Tik Soe*, yang artinya perkumpulan orang-orang Tionghoa dari Hok Kian. Perkumpulan tersebut bertujuan untuk mengembangkan nasionalisme Tiongkok dengan cara melestarikan adat-istiadat Tionghoa. Perkumpulan tersebut diresmikan secara sah oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 9 Januari 1864, berdasarkan akte notaris dengan perantara notaris Meester Thomas Amre Klinkhamer (THHK, 1953). Perkumpulan tersebut diketuai oleh The Boen Hie, yang bergelar *Yang Thay Kong*; dengan wakil The Boen Keh, yang bergelar *Tik Thay Kong* dan Tjoa Djien Sing, yang bergelar *Tjee Tjhwan Kong*. Tetapi siapa sebenarnya pendiri

perkumpulan tersebut, hingga saat ini belum diketahui.

Latar belakang berdirinya perkumpulan *Hok Kian Kong Tik Soe* adalah disebabkan banyak orang-orang Tionghoa, terutama yang merupakan golongan *peranakan*, mulai meninggalkan tradisi leluhur dan mulai terpengaruh oleh budaya dan kepercayaan yang dianut oleh orang pribumi. Lunturnya budaya Tionghoa di lingkungan golongan *peranakan*, bagi para pendiri perkumpulan *Hok Kian Kong Tik Soe*, menunjukkan lunturnya identitas ke-Tionghoa-an golongan *peranakan* (Devi, 2006). Lunturnya budaya Tionghoa di kalangan *peranakan* juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menekan orang-orang Tionghoa yang tidak beragama Kristen.

Tekanan terhadap orang-orang Tionghoa yang tidak beragama Kristen adalah berupa pembedaan golongan-golongan rakyat yang ditetapkan dalam pasal 6-10 dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving* pada tahun 1848. Peraturan tersebut membedakan rakyat Hindia Belanda ke dalam dua golongan, yaitu Eropa dan Bumiputera. Untuk menentukan golongan tersebut, agama digunakan sebagai ukuran. Mereka yang beragama Kristen dimasukkan ke dalam golongan Eropa, termasuk orang Indonesia yang beragama Kristen dimasukkan dalam golongan yang “dipersamakan” dengan orang Eropa; serta semua orang yang tidak beragama Kristen “dipersamakan” dengan orang Bumiputera. Hal itu mengakibatkan jumlah orang-orang Tionghoa yang meninggalkan agama Tionghoa menjadi semakin meningkat demi mendapatkan status Eropa (Su Kim, 2008).

Pada awalnya, untuk melestarikan budaya Tionghoa ini maka perkumpulan *Hok Kian Kong Tik Soe* membangun rumah ibadah bagi masyarakat Tionghoa. Rumah ibadah yang dinamakan Klenteng Hok An Kiong tersebut dibangun di Topekong Straat,

atau sekarang menjadi Jalan Coklat, pada tahun 1830 dan merupakan klinteng tertua di Surabaya. Selain membangun klinteng, perkumpulan *Hok Kian Kong Tik Soe* juga menyusun peraturan-peraturan tentang perilaku sopan-santun untuk orang-orang Tionghoa yang tinggal di Surabaya. Tujuan lain dari perkumpulan ini adalah memberikan bantuan untuk biaya pernikahan, kematian untuk umum, memenuhi keperluan ibadah agama, dan perayaan-perayaan agama (Suryadinata, 2002; dan Su Kim, 2008).

Gerakan dari perkumpulan *Hok Kian Kong Tik Soe* untuk melestarikan adat-istiadat Tionghoa tersebut mendapat dukungan, baik dari golongan *peranakan* maupun *totok*, sehingga dalam kurun waktu yang tidak lama perkumpulan itu berkembang menjadi perkumpulan terbesar dan terkaya di Surabaya. Perkumpulan tersebut tidak hanya berjasa dalam melestarikan adapt-istiadat Tionghoa, namun juga merangsang muncul dan berkembangnya berbagai perkumpulan Tionghoa di Surabaya. Pada awalnya, baik perkumpulan *Hok Kian Kong Tik Soe* maupun perkumpulan-perkumpulan yang lain hanya bersifat sosial dan tidak turut campur dalam masalah politik di Hindia Belanda. Namun, kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang bersifat diskriminatif serta pengaruh situasi di Tiongkok akhirnya mendorong mereka untuk meninjau kembali identitas mereka sebagai orang Tionghoa serta turut aktif dalam gerakan nasionalisme Tiongkok (Suryadinata, 1986).

Pada 17 Maret 1900, oleh sekelompok pedagang dan jurnalis Tionghoa di Batavia (Jakarta sekarang), dalam upayanya memperjuangkan hak-hak minoritas dalam masyarakat kolonial, didirikanlah organisasi *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK). Pendiri organisasi ini adalah Phoa Keng Hek, Khouw Kim An, Khouw Lam Tjiang, Tan Kim San, Lie Kim Hok, dan Lie Hin Liam. Pendirian

organisasi ini sebagai simbol kilas balik kejadian di Tiongkok pada akhir 1890-an, menyusul kekalahan Cina oleh Jepang dalam perang Tiongkok-Jepang pada tahun 1894-1895, yang nampaknya diikuti dengan cermat oleh kaum Tionghoa di Hindia Belanda atau Indonesia sekarang (Adam, 2003:126).

Pendirian organisasi THHK ini sebenarnya terinspirasi oleh suatu gerakan Khonghucu di Singapura yang berusaha untuk menyebarkan pengaruh agama Khonghucu di kalangan perantauan Tionghoa di Singapura. Orang Tionghoa di Hindia Belanda juga kerap kali memandang Singapura sebagai jendela ke dunia luar. Ketika Singapura menjadi basis gerakan Khonghucu, yang banyak dianjurkan oleh para pejuang nasionalis Tiongkok, komunitas Tionghoa peranakan di Hindia Belanda juga tertarik untuk membesarkannya. Pada 1897, jurnalis Lie Kim Hok memperkenalkan ajaran Khonghucu di Hindia Belanda melalui sebuah buku yang diterbitkan di Batavia, yakni *Hikayat Khonghoetjoe* (dalam Adam, 2003:127).

Sejak organisasi THHK itu didirikan, sambutan orang Tionghoa di Jawa luar biasa. Pers, baik yang dikelola orang Tionghoa maupun orang Indo-Belanda, memberi publisitas yang luas terhadap kehadiran organisasi ini. Pada 3 Juni 1900, melalui Ketetapan Gubernur Jenderal No.15, pemerintah kolonial Belanda mengakui organisasi THHK ini secara hukum. Keberhasilan organisasi ini, khususnya dalam bidang pendidikan, memberikan dampak baru tentang cara pandang orang-orang Tionghoa *peranakan* yang mulai terbuka terhadap modernisasi, yang sebagian besar dari mereka berarti menyerap karakter budaya Barat (PPB, 1952; dan THHK, 1953).

Dalam perjalanan waktu, politik kolonial Belanda untuk menggolongkan peranakan Tionghoa agar berorientasi ke Hindia Belanda semakin terlihat dengan jelas. Sekolah-sekolah

Hollandsch Chineesche School (HCS) untuk anak-anak Tionghoa merupakan alat pertama pemerintah kolonial Belanda untuk menghapus identitas ke-Tionghoa-an golongan *peranakan* Tionghoa. Maka menjelang tahun 1920, muncul generasi muda *peranakan* Tionghoa yang berorientasi pada pemerintah Hindia Belanda.

Meskipun sekolah THHK masih tetap ada dan gerakan nasionalisme Tiongkok yang didukung oleh surat kabar *Sin Po* tetap menyala, munculnya generasi muda yang berorientasi pada pemerintah Hindia Belanda ini berhasil memecah golongan *peranakan* ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pendukung nasionalisme Tiongkok dan kelompok yang berorientasi pada pemerintah Hindia Belanda (Suryadinata, 1986).

Pers Tionghoa dalam Konteks Pergerakan Nasional di Indonesia

Studi tentang sejarah pers Tionghoa dalam konteks pergerakan nasional Indonesia pada hakekatnya didasarkan pada hasil-hasil penelitian dan penulisan tentang Sejarah Pers di Indonesia secara umum, sejak kemunculan sampai dengan perkembangannya di awal abad 20. Studi yang dilakukan oleh Ahmat Adam (2003) memberikan gambaran tentang pers Tionghoa sebagai bagian dari sistim pers Hindia Belanda (Indonesia sekarang). Menurutnya, partisipasi orang Tionghoa peranakan di dunia pers dimulai sejak 1869.

Pada awalnya, minat orang Tionghoa di dunia jurnalistik baru sebatas menulis surat serta menyumbangkan berita dan artikel kepada editor surat kabar yang dikelola oleh orang Indo-Belanda. Surat kabar tidak hanya menyediakan orang Tionghoa sebuah forum untuk membeberkan pandangan mereka dan menguji kebolehan mereka menulis syair dalam ragam bahasa Melayu rendah. Bagi mereka, surat kabar merupakan media untuk

mencerca dalam perseteruan pribadi, bahkan sesama anggota komunitas Tionghoa sendiri (Adam, 2003:106).

Lebih lanjut Ahmat Adam (2003) menyimpulkan bahwa masuknya orang Tionghoa *peranakan* ke bisnis surat kabar membuka sebuah era baru dalam pers berbahasa anak negeri. Orang Tionghoa tidak hanya melihat surat kabar sebagai bisnis yang menguntungkan, mereka juga menjadi lebih sadar akan peran yang bisa dimainkan oleh pers dalam membentuk opini publik. Ketidakpuasan umum dari apa yang mereka alami sebagai perlakuan tidak adil oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap kalangan Tionghoa di sektor bisnis dan secara sosial, misalnya, disuarakan secara kuat di dalam pers yang akhirnya melahirkan sebuah kesadaran baru Tionghoa modern dalam bentuk gerakan nasionalisme Tionghoa (Adam, 2003:301-304).

Berdasarkan kajian yang dilakukan bahwa rintisan telah dibuat oleh surat-surat kabar berbahasa Melayu yang lebih dahulu terbit, seperti *Medan Prijaji*. Bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di kepulauan Nusantara telah mendapatkan peran barunya melalui tradisi keberaksaraan (*literacy*) Latin, yaitu huruf Rumi, yang diperkenalkan oleh koran-koran pribumi tersebut. Inilah era baru dimana perasaan kebersamaan sebagai bangsa pribumi (*natives*) diserap melalui pembacaan atas tulisan di halaman kertas lebar menggunakan aksara Latin yang disebut surat kabar (Joe Lan, 1961 dan 1968).

Surat kabar atau koran itu tersebar melintasi batas-batas suku bangsa (etnik) sehingga melahirkan kesadaran bersama dan rasa senasib di antara pembaca yang berlain-lainan suku bangsa itu. Dalam konteks ini penting sekali untuk mengetahui dan memahami bagaimana peranan pers dalam menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan penduduk

keturunan. Sejarah berkembangnya pers di Hindia Belanda dimulai dari diterbitkannya surat kabar berbahasa Belanda, kemudian masyarakat Indo-Belanda, dan Cina juga menerbitkan surat kabar yang berbahasa Belanda dan Cina, juga diterbitkan surat kabar berbahasa Melayu, bahasa daerah, dan terakhir surat kabar berbahasa Indonesia (Soebagio, 1977; dan Said, 1988). Saat itu, orang Indonesia belum mendapatkan pendidikan dan tingkat ekonomi yang memadai, sehingga mustahil untuk membuat surat kabar yang independen.

Menurut Ahmat Adam (2003), kedekatan pers Tionghoa dengan kebangkitan nasionalisme di kalangan Tionghoa *peranakan* dimulai sejak berdirinya perkumpulan THHK (*Tiong Hoa Hwee Koan*). Organisasi ini menandai bangkitnya nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda, di mana hal itu pun mempercepat perkembangan *orgaan* atau corong bagi organisasi itu yang sangat berbaur Tionghoa dalam watak dan orientasinya.

Satu hal yang penting dari sejumlah pers Tionghoa yang dimotori oleh organisasi THHK adalah kebanyakan dari penerbitan mereka menggunakan bahasa Melayu rendah, tapi dengan judul beraksara Tionghoa. Untuk pertama kalinya, setahun setelah pembentukan THHK, maka diterbitkan surat kabar *Li Po* yang dipimpin oleh dua orang *peranakan*, Tan Ging Tiong dan Ijoe Tjai Siang, serta dicetak di Sukabumi dengan menggunakan bahasa Melayu rendah. Penerbitan *Li Po* ini kemudian diikuti oleh penerbitan-penerbitan surat kabar lain yang mengusung nasionalisme Tionghoa di Hindia Belanda (Adam, 2003).

Munculnya surat kabar dengan nama Tionghoa berlanjut hingga periode ketika kebangkitan masyarakat pribumi mulai muncul, seperti lahirnya organisasi-organisasi Sarekat Islam, *Indische Partij*, dan Boedi Oetomo. Hampir setiap tahun bisa muncul surat

kabar Tionghoa yang baru. Pada 1 Juli 1906, di kota Batavia (Jakarta sekarang) beredar mingguan *Seng Kie Po*, yang disusul dengan mingguan seperti *Tiong Hoa Wie Sin Po* di Bogor (Adam, 2003).

Bila melihat keadaan yang memacu, baik pesatnya pertumbuhan surat kabar Tionghoa maupun bermunculan perusahaan percetakan milik orang Tionghoa, tampaklah bukti yang meyakinkan bahwa bangkitnya kesadaran sosial-ekonomi dalam dua dasawarsa terakhir abad ke-19 sangat membantu perkembangan pers yang berorientasi Tionghoa dan menyebabkan kalangan Tionghoa *peranakan* banyak yang menggeluti bidang jurnalistik dengan sungguh-sungguh. Tekanan ekonomi dan tumbuhnya sentimen anti-Tionghoa telah menjadi katalisator yang menyadarkan orang Tionghoa akan peranan dan fungsi penting pers.

Mengentalnya nasionalisme Tionghoa, yang ditunjukkan dengan banyaknya penerbitan surat kabar milik orang Tionghoa, tidak berarti menyebabkan penduduk pribumi merasa terasing dari angin politik baru yang bertiup di Hindia Belanda. Keberhasilan orang Tionghoa menembus industri pers dipuji oleh orang Indonesia, bukan karena keuntungan ekonomi yang bisa mereka peroleh, tetapi pengaruh pers itu terhadap komunitas Tionghoa khususnya dan penduduk pribumi pada umumnya.

Sebuah ungkapan yang datang dari Raden Mas Tirta Adhi Soerjo dalam pertemuan saudagar dan pedagang pribumi yang berasal dari Bandung, Batavia, Yogyakarta, Solo, dan Semarang adalah sebagai berikut:

Karena pengaroehnja soerat2 chabar ini, maka bangsa Tiong Hoa djadi bangoen dari tidoernja, dan masing2 soedah bergerak akan membantoe tiap2 tanda kedadjoean dan ichtiar akan dapat kedadjoean. Inilah sebab bangoennja beberapa perhimpoean dan berdirinya beberapa sekolah dan tegoehnja perniagaan yang dilakukan oleh mereka itoe (dalam Adam, 2003:134).

Pengakuan tokoh lain tentang keberhasilan pers Tionghoa, yang membawa pengaruh baru terhadap perkembangan nasionalisme pribumi, datang dari tokoh Abdul Rivai, seorang editor surat kabar *Bintang Hindia* yang terkenal dengan salah satu tulisannya mengenai “Bangsawan Pikiran”, di mana dalam tulisannya itu Abdul Rivai memberikan penggolongan atas kaum intelektual sebagai bangsawan “pikiran” yang ditujukan kepada kaum terpelajar Indonesia dalam posisi yang sangat penting dalam memimpin bangsanya menuju kemajuan.

Dalam salah satu komentarnya tentang kegiatan warga Tionghoa bahwa kemajuan mereka sudah cukup “progresif” dan pencapaian itu harus diikuti oleh kaum cendekia Indonesia, ia lebih lanjut menyatakan sebagai berikut:

[...] bahwa pikiran dan pendapatan bangsa Tjina di Tanah Hindia sekarang telah terbagi dua: Kaoem Koeno dan Kaoem Moeda. Dalam dua tiga tahun kemoedian, kita melihat betapa kedua kaoem itoe berichthar hendak mengembangkan pikiran dan pandangan seseorang (dalam Adam, 2003:178).

Dalam sebuah tulisan bersambung mengenai “kebangkitan” bangsa Tiongkok, Abdul Rivai menekankan bahwa kaum mudalah yang memimpin Tionghoa *peranakan*. Kekagumannya pada gerakan modernis bangsa Tionghoa menyebabkan Abdul Rivai berulang kali mendesak kawan-kawannya dan pemuda bumiputera di Hindia Belanda (Indonesia sekarang) untuk menyamai orang-orang Tionghoa yang berpikiran modern. Istilah “bangsa Hindia” atau “anak Hindia” selanjutnya dipopulerkan oleh surat kabar *Bintang Hindia*. Sekalipun istilah itu menunjuk kepada golongan lain di Hindia Belanda, seperti Tionghoa dan Arab, namun dalam konteks ini adalah jelas ditujukan kepada orang-orang Indonesia (Soebagio, 1977; dan Said, 1988).

Seruan Abdul Rivai kepada kaum intelektual Indonesia untuk menyamai kaum Tionghoa dan Arab segera diikuti dengan upaya serius dari kalangan jurnalis pribumi yang banyak mendirikan surat kabar dan organisasi baru. Pertumbuhan pers milik bangsa sendiri ini, dengan demikian, menunjukkan kebangkitan kaum pribumi.

Melihat kenyataan itu maka pemerintah Hindia Belanda tidak tinggal diam, dengan segala cara ditempuh untuk menghambat perkembangan pers nasional, antara lain tidak hanya dengan mengancam akan menggunakan Undang-Undang yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berlaku di Hindia Belanda, tetapi ditambah dengan *Pers Breidel Ordonantie*, yaitu kebijakan yang memberi hak kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menghentikan penerbitan yang dianggap berpandangan progresif mendukung gerakan nasionalisme pribumi dan dapat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Belanda.

Karenanya, baik pers nasional maupun pers Tionghoa banyak menghadapi kesulitan dan hambatan untuk berkembang. Serentetan kasus di Pengadilan Hindia Belanda sering diajukan sebagai terdakwa adalah para wartawan dan surat kabar yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diajakannya para wartawan Indonesia ke sidang pengadilan kolonial menjadi fenomena rutin dalam perkembangan pers pergerakan. Nama-nama seperti H.O.S. (Hadji Oemar Said) Tjokroaminoto, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, Dr. Soetomo, Soekarno, Mohamad Hatta, Hadji Agoes Salim, dan lain-lain merupakan tokoh-tokoh yang masuk dalam daftar orang-orang yang tersangkut dalam kasus pengadilan dan dijatuhi hukuman karena tulisan-tulisan mereka yang dianggap sebagai

menghina dan dapat membahayakan kedudukan pemerintah kolonial Belanda (Poesponegoro & Notosusanto eds., 1984; dan KJTJ, 2005).

Kasus peradilan hukum, berkaitan dengan pemberitaan pers, tidak saja dialami oleh para jurnalis nasional Indonesia tetapi kasus-kasus itu pun menimpa jurnalis-jurnalis berdarah Tionghoa (China) yang gencar menyuarakan kebebasan dan perjuangan persamaan dalam masyarakat kolonial. Untuk menyebutkan salah satu tokoh wartawan keturunan China yang cukup dikenal kegarangannya dalam tulisan-tulisan di surat kabar adalah Kwee Thiam Tjing (lahir 9 Februari 1900 di Pasuruan, Jawa Timur, dan meninggal pada 28 Mei 1974 di Jakarta).

Kwee Thiam Tjing adalah seorang jurnalis Tionghoa. Ia menempuh pendidikannya di ELS (*Europeesch Lagere School*) di kota Malang, Jawa Timur, dan kemudian terjun ke dunia jurnalistik. Ia menguasai bahasa Belanda, Jawa, Madura, dan Hokkian. Bahan-bahan tulisannya mencakup segala lapisan masyarakat: kawan-lawan, lelaki-perempuan, tua-muda, dan lain-lain (KJTJ, 2005; dan Lie, 2005).

Pada tahun 1926, Kwee Thiam Tjing dikenai sembilan delik pers, sehingga ia terpaksa mendekam selama sepuluh bulan di penjara Kalisosok, Surabaya, dan penjara Cipinang, Jakarta. Kejadian ini dicatat dalam artikel "Tanggal Paling Tjilaka" di *Soeara Publiek*, Surabaya, pada 5 Januari 1926. Isi beritanya dapat dikutip sebagai berikut:

"Tanggal Paling Tjilaka!!", 5 Djanoeari 1926. Ini hari, satoe redacteur kita, jaitoe toean Kwee Thiam Tjing, ditangkep atas prentah Voorzitter Landraad kerna persdelict, jang besok bakal dipreksa. Prentah boeat tangkep soedah dikeloearken lebih dari satoe minggoe, tapi lantaran toean Kwee baroe semalem kombali dari verlof dan tadi pagi baroe bisa dateng serahken dirinja di Hoofbureau van Politie, maka penangkepan itoe baroe ini

hari dilakoeken.

Hoofdredacteur kita lantas menginget itoe bitjara dari toean Wienecke, minta pada Assistent-Resident boeat, soepaia toean Kwee tidak diborgol. Sebab terlaloe repot sama laen² oeroesan (dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/178>, 15/12/2012).

Lebih lanjut mengenai delik pers Kwee Thiam Thing berkaitan dengan komentarnya tentang seseorang melakukan piutang karena terdorong untuk melakukan pembayaran cicilan pinjaman yang memberatkannya. Secara lengkap tentang isi delik pers diberitakan pada surat kabar *Soeara Publiek*, tanggal 12 Januari 1926, sebagai berikut:

Tadi pagi, Landraad di kepalai oleh Mr. Wienecke sebagai Voorzitter, preksa perkaranja toean Kwee Thiam Tjing jang minggoe laloe dimoendoerken lantaran ia poenja pembela Mr. Jaarsma sakit. Delict pertama, jang ditoentoet, adalah commentaar, jang toean Kwee Thiam Tjing boeboehi atas satoe toelisan dalem Ind. Crnt. W.J.E, tentang toekang mindring, dimoeat dalem *Soeara Publiek*, 19 September 1925. Commentaar itoe berboenji begini:

"Kita moefakat, djika ada seorang Arab, Tionghoa, Blanda, atawa Boemipoetra jang lepas oewang panas, berlakoe begitoe koerang adjar boeat, oempama, masoek dalem kamar tidoer boeat tjari apa² jang mereka rasa ada berharga boeat di djadikan pentjijtjilan dari pindjeman. Itoe orang jang sematjem begitoe tidak oesah goenaken banjak omong, hanja lebih doeloe kemplang sadja kepalanja, lebih keras lebih baik.

Perkara oetang tinggal oetang, tapi djika lantaran satoe pindjeman lantas si pioetang kira bahwa ia djoega boleh pindjem orang poenja antero milik, ini kira'an moesti lantas dikasih laloe dengan djalan palang pintoe naek di kepala. Perkara tinggal belakangan" (dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/178>, 15/12/2013).

Arus Balik dan Kemunduran Pers Tionghoa di Indonesia

Meminjam istilah Pramoedya Ananta Toer (1990), dalam bukunya *Arus Balik*,

kata “arus balik” terhadap pandangan dan orientasi pers Tionghoa terjadi pada periode ketiga gelombang gerakan nasional di Hindia Belanda (Indonesia sekarang). Separuh, bahkan sepanjang penerbitan pers Tionghoa, sebelumnya tidak banyak yang mempunyai perhatian pada kemajuan pergerakan kaum Bumiputera (Lie, 2005). Pengalaman hidup sebagai kelompok yang dipisahkan oleh sekat-sekat rasialis yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda, hal itu berdampak pada sikap saling mencurigai di antara penduduk pribumi dan etnis Tionghoa.

Sentimen anti Tionghoa, yang pertama kali menemukan ekspresinya dalam pers pada era 1870-an, terus menggemakan dalam sejumlah koran yang lebih populer di Batavia, Semarang, dan Surabaya sampai menjelang akhir abad ke-19. Namun, sebenarnya kebencian golongan etnis Tionghoa terhadap sikap kalangan pribumi tersebut tidak sebesar kekecewaan mereka atas perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap komunitas Tionghoa di Hindia Belanda pada umumnya. Khususnya, mereka tidak senang pada peraturan *wijken stelsel* (sistem zona pemukiman) yang membatasi domisili mereka pada apa yang disebut *Pecinan* (ANRI, 1975). Mereka juga mengeluh karena tidak bisa masuk ke kampung-kampung pribumi di Jawa dan karenanya ruang gerak mereka terhalang oleh sistem surat pas (*passenstelsel*), yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda sejak 21 April 1863 (Adam, 2003:103).

Pemberlakuan pajak dan penyelesaian perkara kriminal pun dipandang sebagai kebijakan yang tidak adil buat orang-orang Tionghoa. Kecemburuan terhadap warga pribumi mengemuka dalam peradilan. Mereka tidak senang karena orang pribumi duduk di dewan yang memutuskan masalah hak waris di antara orang-orang Tionghoa, dan menuntut orang Tionghoa juga bisa duduk di dewan itu.

Keluhan-keluhan di atas diilustrasikan melalui sepucuk surat panjang seorang Tionghoa dari Kupang dalam *Hindia-Nederland* edisi 8 dan 12 Januari 1881, dan kemudian dikutip oleh surat kabar *Bintang Timoer* pada 22 Januari 1881, yang menunjukkan “ketidakbahagiaan” orang Tionghoa atas kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap komunitas mereka pada umumnya. Kutipannya adalah sebagai berikut:

Kita orang, bangsa Tjina, jang berdoedoek di antero tana India-Nederland di seboet orang menoempang, sebabnja negri Tjina belon talok di bawah prentah Gouvenement Olanda. Tegal itoe kita orang tiada bole berboeat barang perkara dengan kesoesahan salakoe anak-anak tanah sendiri, soeaktoe kepala Tjina di India Nederland haroes ia bermoehoen pada Gouvernment kaloe-kaloe ia boleh tinggal di sana pada mentjari kehidoepannja (dalam Adam, 2003:104-106).

Keluhan-keluhan yang terlontar di permukaan itu berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan penduduk Tionghoa. Hal ini membekas di kehidupan etnis Tionghoa sampai periode awal abad ke-20. Ini juga berarti bahwa sejak periode awal penerbitan pers Tionghoa, yang dimulai dengan dwi-mingguan *Matahari* sampai dengan periode kebangkitan, ditandai dengan bangkitnya gerakan Pan-Tionghoa. Ditambah lagi dengan kampanye dan keluhan yang dirasakan oleh orang-orang Tionghoa sepanjang tiga dasawarsa terakhir abad ke-19, maka tak heran bila sejak 1900 menjadi penanda penting bagi kesadaran nasional Tionghoa di negeri Hindia.

Kesadaran akan status mereka sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat kolonial Belanda diekspresikan dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun-tahun awal abad ke-20 dalam pers Tionghoa *peranakan*, yang menyatakan diri sebagai suara atau *orgaan* gerakan Pan-Tionghoa, yakni THHK (*Tiong Hoa Hwee Koan*). Dalam hal ini, kekuatan *Sin Po* yang didukung

oleh perkumpulan Tionghoa *peranakan* di seluruh Hindia Belanda memberikan pengaruh yang luas kepada rakyat pribumi. Sebagaimana digambarkan dalam salah satu artikel di bawah ini, yang menyatakan sebagai berikut:

Pengaroehnja ini bagian dari pers soedah sering diakoei oleh banjak pihak dan baroe ini dalem weekblad *Sin Po* (30 November 1935), baroe oentoek pertama kali sastrawan Boemipoetra, jakni toean Armyn Pane, oendjoek bagaimana penting ada'nja bahasa Tionghoa-Melajoe jang digoenakan oleh pers terseboet dan bagaimana oempama verslag voetbal dalem pers Tionghoa-Melajoe enak dibatja sebab idoep bahasa'nja (dalam KTB, 2007).

Meskipun surat kabar *Sin Po* berhaluan nasionalisme Tiongkok dan menyuarakan pandangan orang-orang Tionghoa, bukan berarti surat kabar ini mengabaikan perjuangan nasional orang-orang Indonesia. Apalagi kelompok Tionghoa yang mengelola surat kabar *Sin Po* ini juga menolak kewarganegaraan Belanda. Dengan demikian, mereka tetap menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia. Dalam beberapa periode, *Sin Po* banyak memakai wartawan Bumiputera dan banyak pula memuat berita tentang kelompok pergerakan Indonesia. Melalui *Sin Po* juga lagu "Indonesia Raya" gubahan W.R. Supratman – yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia – untuk pertama kalinya dipublikasikan.

Sementara itu, Ir. Soekarno juga dikenal dekat dengan beberapa surat kabar Tionghoa, termasuk dengan *Sin Po*. Keberhasilan Soekarno dalam mengangkat popularitas PNI (Partai Nasional Indonesia) mendapat sorotan dari beberapa surat kabar Tionghoa. Harian *Soeara Publiek* tahun 1928, misalnya, memberikan seruan penting tentang diri Soekarno sebagai berikut:

Toean Ir. Soekarno c.s. oendjoek boekan sadja mendjadi poetra Indonesia sedjati, tapi djoega mendjadi pemimpin dalem artian toelen dari pergerakan jang moelia

dan bisa dimengerti. Jang orang Olanda oemoemnja tida bisa setoedjoe dengan itoe pergerakan, ini barang tentoe, sebab siapa djoega nanti tida ingin keilangan djajahannja. Tapi bisa dipertjaja jang dalem hati'nja sesoeatoe orang Olanda jang djoedjoer pasti tida bisa tida moesti poedji tindakannja toean Ir. Soekarno (dalam KJTB, 2006a).

Sampai pada masanya, rasa tidak suka etnis Tionghoa kepada langkah penolakan kaum pergerakan pribumi ini pun akhirnya berubah menjadi rasa simpati dan keinginan untuk membantu perjuangan kaum pribumi. Adalah surat kabar *Sin Tit Po*, sebagai wakil pers Tionghoa *peranakan*, yang bersedia menerima penuh ideologi nasionalisme Indonesia. Pengelola surat kabar ini, yang menjadi corong setengah resmi dari PTI (Partai Tionghoa Indonesia), menganggap bahwa Indonesia sebagai tanah airnya dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka juga merasa bahwa nasibnya telah terikat dengan nasib orang Indonesia pribumi. Maka, tak aneh jika *Sin Tit Po* ikut menyebarkan ide-ide nasionalisme Indonesia (Suryadinata, 1986).

Sin Tit Po semula bernama *Sin Jit Po* dan merupakan surat kabar pengganti dari surat kabar *Sin Po* edisi Jawa Timur yang mengalami kegagalan dan diambil-alih oleh tuan Lim Bok Sioe dan ditukar namanya menjadi *Sin Jit Po* dan akhirnya menjadi besar dengan nama *Sin Tit Po*. Surat kabar ini menjadi koran ternama di Jawa Timur pada zaman pergerakan nasional Indonesia. Adalah menarik untuk mengutip perkembangan surat kabar ini pada zaman pergerakan nasional di Indonesia, sebagai berikut:

[...] oleh kerna masjarakat Tionghoa di Djawa Wetan merasa perloe mempoenjai soerat kabar harian jang sedikit-dikitnya mirip *Sin Po* di Djakarta, maka sebagian pemimpin Tionghoa di sana (Djawa Timoer) mengandjoerkan pada pemimpin *Sin Po* di Djakarta agar di Soerabaia, *Sin Po* mengadakan edisi Djawa Timoer. Hal ini diloeloeskan, maka pada bulan Djoeli

dari taon 1922, “*Sin Po* mempoenjai edisi Djawa Timoer dengan berkedoedoekan di Soerabaia. [...] oleh toean Lim Bok Sioe ditoeker namanja menjadi *Sin Jit Po*, dan berkat djasanya toean Lim Koen Hian diperkokoh mendjadi *Sin Tit Po*, dan hingga dewasa mendjadi koran ternama di Djawa Timoer (dalam KTB, 2008).

Dinamisasi politik di daratan Tiongkok (China), khususnya dengan perkembangan perpecahan sikap antara Pemerintah Nasionalis Cina dan Front Persatuan Nasionalis yang digalang oleh Partai Komunis Cina, berdampak langsung pada jiwa dan semangat penerbitan pers Tionghoa di Hindia Belanda (Indonesia sekarang). Perpecahan itu bermula ketika Pemerintah Nasionalis Cina berpihak kepada negara-negara Sekutu dalam Perang Dunia II (1939-1945). Bantuan perang dari negera-negara Sekutu, yang diterima oleh Pemerintah Nasionalis China, telah menempatkan pasukan Tentara Merah dibawah kendali Partai Komunis Cina pada kedudukan yang terpinggirkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap jiwa Front Persatuan Nasionalis yang sesungguhnya segenap Angkatan Bersenjata China (termasuk Tentara Merah) berada dalam satu komando (Sukisman, 1983:29).

Gejala keretakan antara Pemerintah Nasionalis Cina dan Front Persatuan Nasionalis terutama terjadi ketika Jenderal Jiang Kai Shek memerintahkan satuan Tentara ke-4 dari Tentara Merah untuk berpindah dari kedudukannya di daerah Shang Dong dan Kiang Su. Perintah itu tidak dipatuhi, sehingga Jenderal Jiang Kai Shek mengirim pasukan nasionalis untuk menangkap panglima dari Tentara ke-4 Tentara Merah pada tanggal 17 Januari 1941. Sejak saat itu, ketegangan dan suasana curiga-mencurigai di antara kedua golongan angkatan bersenjata tersebut makin menjadi-jadi (Sukisman, 1983; dan Suryadinata, 2002).

Dampak tidak langsung dari perpecahan politik di negeri Tiongkok

tersebut terjadi dalam konstelasi hubungan orang-orang Tionghoa dengan penguasa baru di Asia, yaitu Jepang. Pengaruh Jepang di Cina Utara sudah menimbulkan kebencian yang mendalam pada masyarakat Tiongkok (China Selatan). Sejak tahun 1932, Mancuria diduduki oleh tentara Guan Dong dari Kekaisaran Jepang dan kemudian didirikan “negara boneka Manchu” atau *Manchuguo*. Selain Guan Dong, beriktunya wilayah Mongolia berhasil dikuasai oleh Jepang. Sengketa China – Jepang itu menghasilkan kebencian rakyat China yang memuncak ketika terjadi peristiwa “penculikan” terhadap Jenderal Jiang Kai Shek di Xi An yang bertujuan untuk memaksanya menghimpun kekuatan nasional melawan Jepang (Sukisman, 1983).

Pada bulan April 1936, pemerintah Jepang mengajukan tuntutan kepada pemerintah China agar: (1) menghentikan permusuhan terhadap Jepang dan bersedia bersama-sama menentang Komunisme; (2) menempatkan penasehat Jepang pada segenap cabang pemerintah China; serta (3) mengakui kedudukan khusus dari Jepang di China Utara. Tuntutan tersebut tentu saja ditolak oleh pemerintah China. Bahkan rakyat China menanggapi dengan aksi boikot terhadap barang-barang produksi Jepang sehingga impor dari negara tersebut menurun sampai dengan 30% (Sukisman, 1983:29).

Sikap penolakan dan kebencian terhadap agresi Jepang di China juga dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda (Indonesia sekarang). Sampai kedatangan delegasi Jepang pada 12 September 1940, dibawah pimpinan I. Kobayashi, di Batavia memberikan kesempatan kepada para pemimpin nasional Indonesia untuk membicarakan berbagai soal politik dan ekonomi. Tersiar desas-desus bahwa telah terjadi pertukaran rencana antara delegasi itu dengan

para pemimpin nasional mengenai bentuk pemerintahan Hindia Belanda didalam kerangka “susunan baru” Jepang. Kedatangan mereka juga disertai tindakan bantuan konkrit berupa keuangan kepada pers Indonesia dalam bentuk pemasangan iklan di surat kabar Indonesia (Poesponegoro & Notosusanto eds., 1984:315).

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), dunia pers di Indonesia dikendalikan berdasarkan Undang-Undang Penguasa, atau *Osamu Seirei*, No.16 tentang pengawasan badan-badan pengumuman dan pemilikan pengumuman serta penerangan. Pada pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Terlarang menerbitkan barang tjetakan yang berhoehoeng dengan pengemoeman ataoe penerangan, baik beroepa penerbitan setiap hari, setiap minggoe, setiap boelan, maoepoen penerbitan dengan tidak tertentoe waktoenja, kecoeali oleh badan-badan jang soedah mendapat izin (Said, 1988:48).

Berdasarkan ketentuan penguasa Jepang tersebut, semua surat kabar Belanda dan Cina dilarang terbit. Panglima militer Jepang kemudian menerbitkan nama-nama sejumlah surat kabar pribumi sesuai keinginannya. Sensor dilakukan atas segala cetakan, bahkan berita-berita dan karangan-karangan juga disaring dahulu oleh petugas sensor.

Akhirnya, usai sudah sebagian besar surat-surat kabar Tionghoa di Indonesia, kecuali yang dapat bertahan dengan diam-diam dan itupun selalu mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah pendudukan Jepang. Umumnya, koran-koran besar seperti *Thian Sung*, *Sin Po*, *Sin Jit Pao*, *Siang Po*, *Keng Po*, dan *Kong Ha Po* mengalami nasib yang sama, yakni penerbitannya diberhentikan dan para pemimpin Redaksinya ada yang ditangkap oleh pihak militer Jepang kalau mereka tidak mau mengakui propaganda

Jepang. Sebagaimana digambarkan oleh *Tjamboek Berdoeri* tentang suasana pada masa itu, sebagai berikut:

[...] waktoe berdjalan teroes hingga tibalah saat'nja Djepang doedoeki ini kepoelaoean, seperti djoega soerat2 kabar Tionghoa-Melajoe laennja, seperti *Thian Sung*, *Jit Pao*, *Tja Pao*, *Siang Po*, *Keng Po*, *Kong Hwa Po* [...] *Sin Po* djoega di-beslag Djepang. Seantero redactie'nja soerat-kabar itoe diinternir, tjoema boleh di-bilang sanget beroentoeng toean Kwee Kek Beng jang ditjari Djepang tida ketangkep (dalam KTB, 2009).

Demikianlah dapat digambarkan bahwa kekuasaan militer Jepang akhirnya menutup sebagian besar aktivitas pers Tionghoa di Hindia Belanda (Indonesia sekarang). Kenyataan ini mendorong pers Tionghoa digantikan kedudukan dan peranannya oleh pers pemerintah pendudukan Jepang dan pers bumiputera Indonesia. Pada zaman Jepang (1942-1945), dengan demikian, telah terjadi “arus balik” dalam sejarah pers Tionghoa di Indonesia.

Kesimpulan

Pers sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat akhirnya dijadikan sebagai alat perjuangan yang efektif dalam menyebarkan kesadaran nasional. Berdasarkan fungsi dan kedudukannya, pers sebagai media informasi, sekaligus menjadi perpanjangan tangan kaum pergerakan dalam menuangkan gagasan, ide, serta aspirasi perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Pers yang dimaksud saat itu berbentuk surat kabar, majalah, atau sekedar pamflet yang disebarluaskan di kalangan nasionalis.

Arti penting peranan pers di masa pergerakan nasional dapat difahami lewat pengetahuan tentang kedudukan dan fungsi pers selama masa pergerakan nasional di Indonesia. Pers pergerakan nasional tidak hanya membuat terobosan revolusi komunikasi, tetapi pers juga

menciptakan suatu sistem jalinan komunikasi yang terbuka dimana informasi dapat diperoleh oleh berbagai golongan sosial dalam masyarakat Hindia Belanda (Indonesia sekarang). Pers di masa pergerakan ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat, menjadi pusat informasi, dan media aspirasi dalam mengangkat isu-isu kesejahteraan pribumi dan kehidupan sosial-politik masyarakat Bumiputera.

Pers pada zaman pergerakan, terlebih lagi pers Tionghoa, pada akhirnya dipandang mampu memberi inspirasi bagi perkembangan kesadaran berbangsa di kalangan warga keturunan China di Hindia Belanda. Penerbitan pers Tionghoa yang mampu menjangkau pembacanya secara luas berdampak pada pengetahuan dunia luar yang diberitakan oleh surat-surat kabar Tionghoa-Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan, umumnya pers yang diterbitkan oleh golongan Tionghoa *peranakan*, mampu menjangkau pembaca di tingkat lokal. Meskipun sebagian besar warga pribumi buta huruf, namun di kalangan kaum terpelajar lokal, kehadiran pers Tionghoa menjadi sangat berarti.

Pers Tionghoa juga berpotensi membangkitkan kesadaran kolektif yang menjurus kepada upaya membangkitkan kesadaran kaum Tionghoa tentang arti pentingnya "nasionalisme". Karenanya, pers Tionghoa menciptakan suatu sistem komunikasi yang terbuka, khususnya bagi para kaum muda dan elite modern China yang telah memahami arti penting sebuah media massa bagi keberlangsungan kelompok mereka. Itu artinya bahwa peranan pers Tionghoa dalam hubungannya dengan dinamika pergerakan nasional di Indonesia adalah pers yang dapat menyalurkan aspirasi dan tujuan perkumpulan-perkumpulan atau partai politik, serta tokoh-tokoh pergerakan Tionghoa yang dapat bekerjasama dengan kaum pergerakan Bumiputera di Indonesia.

Bibliografi

- Adam, Ahmat. (2003). *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan*. Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, Terjemahan.
- ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia]. (1975). *Staatsblad 1886 No.57 dan 1871 No.145*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Budiharto, Sutrisno. (2005). "Menengok Kiprah Suku Tionghoa dalam Sejarah Pers di Indonesia" dalam surat kabar *Radar Solo*. Surakarta: 15 Februari. Tersedia juga di: <http://budiharto.blog.com> [dilyari di Jakarta: 13 Juni 2012].
- Daeng Materu, Mohamad Sidky. (1985). *Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Deppen RI [Departemen Penerangan Republik Indonesia]. (2000). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pers*. Jakarta: Deppen RI.
- Deppen RI [Departemen Penerangan Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pers*. Jakarta: Deppen RI.
- Devi, Shinta. (2006). "Gerakan Nasionalisme Tiongkok Etnis Tionghoa di Surabaya pada Awal Abad 20" dalam <http://www.google.co.id/search?hl=id&q=sejarah+nasionalisme+tionghoa&btnG=Telusuri&meta> [diakses di Jakarta: 26 Mei 2012].
- ENI (*Ensiklopedi Nasional Indonesia*). Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/178> [diakses di Jakarta, Indonesia: 15 Desember 2012].
- Joe Lan, Nio. (1961). *Peradaban Tionghoa Selajang Pandang*. Djakarta: Penerbit Keng Po.
- Joe Lan, Nio. (1968). *Sastera Indonesia-Tionghoa*. Djakarta: Gunung Agung.
- Jusuf, Tedy. (2000). *Sekilas Budaya Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Kahin, George McTurnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, Terjemahan oleh Nin Bakdi Soemanto, cetakan kedua.
- KJTB [Kenangan Journalist Tjamboek Berdoeri]. (2005). "Pers Delict Kwee Thiam Tjing" dalam *Soera Publiek*, 12 Djanoeari 1926. Diambil 09 Agustus 2008 dari <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/181> [diakses di Jakarta, Indonesia: 2 Desember 2012].
- KJTB [Kenangan Journalist Tjamboek Berdoeri]. (2006a). "Berachirnja ... di Depan Bangkenja Swara Publiek" dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/179> [diakses di Jakarta, Indonesia: 15 Desember 2012].
- KJTB [Kenangan Journalist Tjamboek Berdoeri]. (2006b). "Berachirnja ... Satoe Peladjaran dalem Pengidoepan" dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/180>

- [diakses di Jakarta, Indonesia: 8 Desember 2012].
- Kohn, Hans. (1976). *Nasionalisme: Arti dan Sejarah*. Jakarta: Penerbit Pembangunan, Terjemahan.
- KTB [Kenangan Tjamboek Berdoeri]. (2007). "Pengaruhnya Pers Tionghoa" dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/199> [diakses di Jakarta, Indonesia: 14 Agustus 2012].
- KTB [Kenangan Tjamboek Berdoeri]. (2008). "Riwayat *Sin Po* dan Perkembangannya" dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/199> [diakses di Jakarta, Indonesia: 14 Agustus 2012].
- KTB [Kenangan Tjamboek Berdoeri]. (2009). "Riwayat *Sin Po*: Achir dan Maksoed Toelisan" dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/199> [diakses di Jakarta, Indonesia: 14 Agustus 2012].
- Lie, Hendy. (2005). "Menengok Kiprah Suku Tionghoa dalam Sejarah Pers di Indonesia" dalam <http://www.geocities.com/tile32puisi/artikel.html> [diakses di Jakarta, Indonesia: 11 Agustus 2012].
- Luarso, Lukas. (2000). "Pers Indonesia: Pergulatan untuk Kebebasan" dalam <http://www.IndoNews.com/> [diakses di Jakarta: 28 Agustus 2012].
- Nodia, Ghia. (1998). "Nasionalisme dan Demokrasi" dalam Larry Diamond & Marc F. Plattner [eds]. *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*. Bandung: Penerbit ITB [Institut Teknologi Bandung], Terjemahan.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto [eds]. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Penerbit Balai Pustaka.
- PPB [Panitya Penerbitan Buku]. (1952). *Buku Peringatan Hari Ulang Tahun ke-40 Tiong Hoa Hak Hauh Bandjaran (Tegal)*. Tegal, Djawa Tengah: Panitya THHK.
- Purnama, Feri. (2007). "Salam Hormat 'Bapak Pers' Indonesia" dalam www.jurnalistikuinsgd.com [diakses di Jakarta: 8 Februari 2011].
- Rahmadi, F. (1990). *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Rahzen, Taufik. (2007). "Seabad Pers Kebangsaan, 1907-2007" dalam http://pencintabuku.multiply.com/journal/item/67/Seabad_Pers_Kebangsaan_1907-2007.htm [diakses di Jakarta, Indonesia: 15 Desember 2012].
- Said, Tribuana. (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Haji Masagung, edisi kedua, cetakan pertama.
- Saputra, Yahya Andi. (1991). "Pers Pergerakan: Pers Pembela Rakyat" dalam surat kabar *Berita Buana*. Jakarta: 9 Februari.
- Siebert, P.S. et al. (1986). *Empat Teori Pers*. Jakarta: PT Intermedia, Terjemahan oleh Putu Laxman Sanjaya Pendit.
- Smith, Anthony D. (2003). *Nasionalisme: Teori-Ideologi-Sejarah*. Jakarta: Penerbit Erlangga, Terjemahan.
- Soebagio, I.N. (1977). *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit Dewan Pers.
- Soebagio, I.N. (1981). *Jagat Wartawan Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Su Kim, Lee. (2008). "The Peranakan Baba Nyonya Culture: Resurgence or Disappearance?" dalam *Jurnal Sari*, No.26.
- Sukisman, W.D. (1983). *Sejarah Cina Kontemporer: Dari Revolusi Nasional, Melalui Revolusi Kebudayaan, Sampai Modernisasi Sosialis*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, cetakan pertama.
- Surjomihardjo, Abdurahman & Leo Suryadinata. (1980). *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Deppen RI [Departemen Penerangan Republik Indonesia] dan Leknas LIPI [Lembaga Kebudayaan Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia].
- Suryadinata, Leo. (1978). *Pribumi Indonesians: The Chinese Minority and China*. Singapore: Hainemann Asia.
- Suryadinata, Leo. (1986). *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa, 1917-1942*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suryadinata, Leo. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Taufik, I. (1977). *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: PT Triyinc.
- THHK [Tiong Hoa Hwee Koan]. (1953). *Buku Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 T.H.H.K. Surabaya, 1903- 1953*. Surabaya: Penerbit THHK.
- Thiam Tjing, Kwee. (2008). "Tokoh Pers Indonesia" dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kwee_Thiam_Tjing [diakses di Jakarta, Indonesia: 11 Agustus 2012].
- Toer, Pramoedya Ananta. (1990). *Arus Balik*. Jakarta: Penerbit Hasta Mitra.